

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 18 Juni 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Media Indonesia (Halaman 9)	Selasa, 18 Juni 2019	Air Waduk Mulai Mengering	Selain tanaman padi, minimnya debit air di sebagian besar waduk dan embung juga akan berdampak pada ratusan hectare tanaman jagung.
2	Media Indonesia (Halaman 11)	Selasa, 18 Juni 2019	Kuota KPR Bersubsidi Sulit Ditambah	Rencana penambahan kuota KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih belum dapat dipastikan.
3	Kompas (Halaman 1)	Selasa, 18 Juni 2019	Berita Foto	Dua warga melintasi banjir yang menggenangi Desa Laikandonga, Kecamatan Ranemeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (17/6/2019). Banjir parah masih menggenangi empat kabupaten dan sekitar 10.000 warga terdampak.
4	Kompas (Halaman 7)	Selasa, 18 Juni 2019	Menata Ulang Lanskap Pulau Jawa	Mungkin Daendels tidak pernah membayangkan Jawa akan sepadat sekarang. Sampai kini Jawa masih tetap konsisten menopang hampir 20 persen perekonomian Indonesia.
5	Kompas (Halaman 12)	Selasa, 18 Juni 2019	Surabaya Perbanyak Taman Kota	Pemerintah Kota Surabaya terus menambah taman kota. Kehadiran taman sebagai ruang publik yang dilengkapi arena bermain anak-anak dan olahraga itu bisa menjadi wadah bagi warga menyalurkan bakat dan kreativitas, bersosialisasi dan berinteraksi, sekaligus mempercantik estetika kota dan menyeimbangkan suhu udara.
6	Kompas (Halaman 13)	Selasa, 18 Juni 2019	Kota Samarinda Perlu Rp 25,7 M	Banjir sehari-hari di sejumlah kabupaten dan provinsi. Banjir kali ini di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara tercatat paling parah. Daya dukung lingkungan telah terlampaui.
7	Kompas (Halaman 14)	Selasa, 18 Juni 2019	Jembatan Way Mesuji di Lampung Ambles	Jembatan di Mesuji Lampung, ambles akibat dilewati dua truk dengan berat melebihi kapasitas jembatan. Arus lalu lintas dialihkan dari timur ke jalur tengah.
8	Kompas (Halaman 14)	Selasa, 18 Juni 2019	Pemberdayaan Citarum Bisa Diakses Dana Desa	Dana desa sekitar Rp 1 miliar per desa setiap tahun boleh dimanfaatkan program pemberdayaan masyarakat desa dalam mitigasi bencana.
9	Kompas (Halaman 14)	Selasa, 18 Juni 2019	Penataan Kota Pacu Industri Kreatif	Penataan kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, terus dilakukan. Penataan itu dilakukan untuk menjadi destinasi wisata unggulan sekaligus menjadi etalase industri kreatif produk asal Jateng dan sekitarnya.
10	Koran Tempo (Halaman 18)	Selasa, 18 Juni 2019	DKI Hapus Rperda Rencana Tata Ruang Pantai Jakarta	Pengamat tata kota mempertanyakan aturan tentang kewajiban pengembang reklamasi. Pemerintah DKI Jakarta menghapus Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
11	Bisnis Indonesia (Halaman 2)	Selasa, 18 Juni 2019	Smart City Terimpit, Perlu Perubahan Paradigma	Bisnis Indonesia edisi Kamis 13 Juni 2019 halaman 21 menyajikan liputan bertajuk Kota Pintar Terimpit Ambisi Pemda. Dalam artikel tersebut disebutkan dua nara sumber memberikan keterangan mengenai hambatan yang mereka alami dalam menggelar jaringan telekomunikasi (yang merupakan infrastruktur utama Smart System) di berbagai daerah.
12	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Selasa, 18 Juni 2019	AIR MINUM JATILUHUR TAHAP I :	Proyek perusahaan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur Tahap I berpotensi tertunda

			Jasa Tirta II Belum Dapat Penjaminan	karena Perum Jasa Tirta II selaku penanggung jawab proyek kerja sama tidak mendapat persetujuan penjaminan. Proyek bisa berlanjut bila skema perusahaan diubah.
13	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Selasa, 18 Juni 2019	Sebagian Jakarta Rawan Tenggelam	Perpindahan Ibu Kota ke luar Jawa dipicu dari beberapa hal yang dikhawatirkan oleh negara salah satunya adalah air tanah yang makin langka serta sebagian wilayah Jakarta yang diprediksi tenggelam pada 2050.

Judul	<b>Air Waduk Mulai Mengering</b>	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 9)		
Resume	Selain tanaman padi, minimnya debit air di sebagian besar waduk dan embung juga akan berdampak pada ratusan hectare tanaman jagung.		

# Air Waduk Mulai Mengering

*Selain tanaman padi, minimnya debit air di sebagian besar waduk dan embung juga akan berdampak pada ratusan hektare tanaman jagung.*

**M YAKUB**  
yakub@mediaindonesia.com

**S**EJUMLAH waduk dan embung di wilayah pantura Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim), mulai mengering. Hal itu mulai terjadi dalam sebulan terakhir.

Kekeringan terjadi karena hujan tidak turun dalam sebulan terakhir. Akibatnya, debit air menyusut sehingga sebagian petani beralih menanam palawija karena khawatir tanaman padi mereka bakal mengalami puso.

Adapun petani lainnya, membiarkan lahan mereka telantar tanpa tanaman. Waduk-waduk di bagian utara kabupaten tersebut yang mulai mengering, di antaranya waduk di Banyuwangi, waduk Desa Pentenan, dan embung Desa Delekan di Kecamatan Panceng.

Selain itu, waduk Desa Mentaras dan waduk Siraman di Kecamatan Dukun juga sudah mengering sejak sebulan terakhir. Di antara waduk-waduk tersebut, hanya waduk Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, yang masih memiliki sisa air. Waduk lainnya, yaitu Waduk Sumengko di Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, debit airnya terus menurun karena dipakai untuk irigasi.

Diperkirakan dampak terbesar akibat kekeringan waduk tersebut akan terjadi pada lahan yang jauh dari irigasi.

"Panen akan menurun drastis musim ini," kata Kardi, warga



**KEKERINGAN DI JAWA TENGAH:** Foto udara areal persawahan yang mengalami kekeringan di Desa Banjar Anyar, Brebes, Jawa Tengah, kemarin. Menurut BPBD Jateng, sebanyak 1.259 desa dari 360 kecamatan di Jawa Tengah mengalami kekeringan dan berdampak pada berkurangnya produksi padi yang hanya dua kali musim tanam.

Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, kemarin.

Selain tanaman padi, minimnya debit air di sebagian besar waduk dan embung juga akan berdampak pada ratusan hektare (ha) tanaman jagung. Kondisi itu diperparah oleh serangan hama tikus menjelang masa panen jagung.

Hal yang sama juga terjadi di Waduk Gajah Mungkur. Air di waduk itu, sejak sebelum Lebaran, mulai menyusut. Penyusutan air praktis memengaruhi pasokan ke irigasi ke wilayah pertanian Colo Barat.

Imbasnya, dikhawatirkan tanaman padi akan mengalami puso. Hal ini terjadi karena debit air dari Dam Colo sisi barat yang tadinya sebesar 5 meter kubik per detik, menyusut hingga tinggal 4 meter kubik per detik.

## Hampir 2 pekan

Sementara itu, ratusan hektare lahan sawah di enam kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terancam mengalami kekeringan karena belum turunnya hujan hampir dua pekan. Dinas Pertanian, Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura

setempat mulai mewaspadai ancaman tersebut lantaran tidak menutup kemungkinan akan meluas menyusul prediksi terjadinya kemarau.

"Luasan potensi lahan sawah yang terancam mengalami kekeringan ini ialah dari hasil pendataan koordinator pengamat organisme pengganggu tanaman (POPT) Kabupaten Cianjur pada periode 1-15 Juni 2019," kata Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur, Dandan Hendayana, kepada

Media Indonesia, kemarin.

Berdasarkan hasil pendataan, luasan area sawah yang terancam kekeringan ialah sekitar 506 ha. Rinciannya, di Kecamatan Naringgul 360 ha, Kecamatan Cilaku 50 hektare, Kecamatan Tanggeung 22 ha, Kecamatan Cijati 34 ha, Kecamatan Karantengah 15 ha, dan Kecamatan Bojonepicung 25 ha.

Selain itu, terdapat juga lahan sawah yang mengalami kekeringan tingkat sedang, yakni sekitar 5 ha di Kecamatan Cijati. "Kekeringan status ringan selalu 40,2 ha." (WJ/BB/N-3)

Judul	<b>Kuota KPR Bersubsidi Sulit Ditambah</b>	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 11)		
Resume	Rencana penambahan kuota KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih belum dapat dipastikan.		

# Kuota KPR Bersubsidi Sulit Ditambah

*REI mengusulkan sejumlah alternatif untuk menggunakan anggaran di luar uang negara.*

**FETRY WURYASTI**  
fetry@mediaindonesia.com

**R**ENCANA penambahan kuota KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih belum dapat dipastikan.

Pasalnya, penambahan kuota subsidi harus dilakukan dengan mekanisme APBN Perubahan. Adapun saat ini pemerintah tidak memiliki rencana untuk melakukan APBN Perubahan.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU-Pera Adang Sutara menjelaskan bahwa penambahan kuota secara otomatis akan menambah anggaran. Sementara, perihal tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan.

"Jadi penambahan anggaran mungkin baru ada tahun depan," ujar Adang kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Sebelumnya, muncul permintaan dari para pengembang hunian kepada pemerintah untuk menambah kuota rumah subsidi. Dari alokasi tahun ini 168 ribu unit, sekitar 79% sudah terealisasi. Kuota yang tersisa sekitar 30 ribu lagi diperkirakan habis pada Agustus mendatang.

Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menje-

laskan jumlah antrean untuk realisasi KPR subsidi di Bank BTN sudah sebanyak 50 ribu unit. Jadi sesungguhnya sisa anggaran sudah habis.

subsidy bagi MBR di daerah seperti Medan Sumatera Utara, dan Bangka Belitung yang sudah tidak bisa akad/ ditunda akad subsidi. Sebab, kuota KPR subsidi habis. Demikian pula hal yang sama terjadi di Pekanbaru Riau dan Palembang.

"Banyak pengembang melapor tidak bisa akad, karena kuota KPR subsidi dengan subsidi bantuan uang muka (SBUM) ter-*pending* karena kuota habis," ujar Daniel.

**Duduk bersama**  
Rencananya besok REI akan mengumpulkan seluruh asosiasi untuk meramu beberapa alternatif solusi untuk menyelesaikan kembali arus dana (*cash flow*) pengembang akibat keterbatasan kuota KPR Subsidi.

Bila penambahan kuota KPR subsidi tidak bisa realisasi tahun ini, sedangkan kredit konstruksi mereka terus berjalan, besar kemungkinan pengembang bisa kolaps dan menimbulkan kredit macet (NPL) di perbankan.

**"Untuk FLPP sudah habis dan untuk SSB tersisa 30 ribuan unit. Kami perkiraan Juli habis."**

laskan jumlah antrean untuk realisasi KPR subsidi di Bank BTN sudah sebanyak 50 ribu unit. Jadi sesungguhnya sisa anggaran sudah habis.

Saat dihubungi terpisah, Direktur Konsumer Bank BTN Budi Satria sebagai Bank Pelaksana program KPR Bersubsidi mengatakan BTN memiliki total kuota 127.104 unit terdiri dari 28.744 unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan 98.360 unit selisih suku bunga (SSB). Kuota BTN berkisar 75% dari total kuota anggaran pemerintah.

"Untuk FLPP sudah habis dan untuk SSB tersisa 30 ribuan unit. Kami perkiraan Juli akan habis. Itu hanya kuota BTN, tapi kan masih ada di bank-bank lainnya," jelas Budi Satria.

Saat dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali menambahkan, saat ini banyak pengembang rumah

**Budi Satria**  
Direktur Konsumer BTN

REI pun mengusulkan sejumlah alternatif untuk menggunakan anggaran di luar uang negara. Selain itu kemungkinan lainnya, tenor KPR pun bisa diperpendek, seiring kenaikan pendapatan dari *end user*.

"*End user* yang mendapat fasilitas KPR bersubsidi, tingkat gajinya bisa akan jauh lebih tinggi berbeda dalam 5-10 tahun. Tenor bisa jadi 10 tahun atau diperpendek. Tujuannya supaya bisa dibagi dengan *end user* lainnya," jelas Totok.

Yang pasti kendala dalam program KPR bersubsidi ini ialah ketersediaan pendanaan dari pemerintah.

CEO Indonesia Property Watch Ali Traghanda menyampaikan, meski permintaan rumah subsidi terus naik, anggaran pemerintah di sektor perumahan terbatas hanya 3% di APBN. (Pra/E-1)

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman 1)		
Resume	Dua warga melintasi banjir yang menggenangi Desa Laikandonga, Kecamatan Ranemeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (17/6/2019). Banjir parah masih menggenangi empat kabupaten dan sekitar 10.000 warga terdampak.		

### Banjir di Sulawesi Tenggara



KOMPAS/SAIPUL RIJAL YUNUS

Dua warga melintasi banjir yang menggenangi Desa Laikandonga, Kecamatan Ranemeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (17/6/2019). Banjir parah masih menggenangi empat kabupaten dan sekitar 10.000 warga terdampak.

Judul	<b>Menata Ulang Lanskap Pulau Jawa</b>	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman 7)		
Resume	Mungkin Daendels tidak pernah membayangkan Jawa akan sepadat sekarang. Sampai kini Jawa masih tetap konsisten menopang hampir 20 persen perekonomian Indonesia.		

# Menata Ulang Lanskap Pulau Jawa

**Restu Gunawan**

*Direktur Kesenian, Sekretaris Masyarakat Sejarahwan Indonesia*

Mungkin Daendels tidak pernah membayangkan Jawa akan sepadat sekarang. Sampai kini Jawa masih tetap konsisten menopang hampir 50 persen perekonomian Indonesia.

Gubernur Jenderal Daendels pada waktu membangun jalan raya Post (Groote Postweg) dari Anyer sampai Panarukan sederhana berpikrinya: bagaimana mengirimkan surat sampai ke alamat dalam waktu 3 kali 24 jam. Untuk itulah, pada 29 Mei 1808 Daendels memulai pembangunan jalan pos tersebut.

Dengan kerja paksa dan melibatkan seluruh aparat desa, maka dalam waktu setahun jalan sudah fungsional digunakan. Dampak dari pembangunan jalan tersebut ternyata sangat luar biasa.

Di sepanjang jalan tersebut muncul permukiman baru dan kemudian berkembang menjadi kota-kota yang menjadi pusat urbanisasi. Masa setelahnya, program tanam paksa pada tahun 1830-an dan pembangunan juga masif dilaksanakan di berbagai bidang, di antaranya membuka jalur kereta api. Jadi, sarana infrastruktur awal telah mempercepat pertumbuhan kawasan ekonomi di kota-kota di Jawa.

Pembangunan jalan raya telah mempercepat proses kotanisasi Pulau Jawa. Pembangunan jalan Anyer-Panarukan pada eranya telah dijadikan *tagline* arah baru pembangunan di Hindia Belanda. *Tagline* itu pada masa setelah kemerdekaan diubah menjadi dari Sabang sampai Merauke.

Tanam paksa dan juga pembangunan infrastruktur di Jawa ternyata telah mengubah lan-

skap alam di Jawa. Banyak tanaman hutan berubah menjadi tanaman industri perkebunan. Ada teh, tebu, dan kopi.

Perubahan lanskap Pulau Jawa ini tentu telah mengubah pula daya tahan dan kerentanan tanahnya. Contoh yang paling sederhana adalah daya tahan terhadap air. Kondisi ini pernah dilukiskan oleh sang maestro lukis Raden Saleh dengan judul lukisan "Watersnood op Midden Java" atau banjir di Jawa Tengah. Lukisan itu dikirim dari Batavia ke Belanda tahun 1862 dan kemungkinan ditempatkan di koleksi seni Huis van Oranje Nassau.

Namun, kini lukisan itu tidak diketahui siapa kolektornya. Warner Kraus, penulis buku Raden Saleh, memperoleh gambar tersebut dari foto lukisan tua dalam koleksi foto Koninklijk Instituut voor de Tropen di Amsterdam.

Lukisan itu menggambarkan drama hidup dan mati dari 17 orang yang putus asa dan saling berpegangan tangan satu sama lain dan memeluk erat barang bawaan mereka. Di latar depan terdapat mayat seorang perempuan muda yang mengambang dan selanjutnya sisa orang di kelompok yang dalam ancaman maut itu mungkin menunggu nasib. Di atap paling atas muncul harapan, ada seorang laki-laki dan perempuan, memandangi sebuah perahu menerobos jalan melalui air pasang. Mereka gelisah dan berbicara sambil menggerakkan tangan meminta bantuan.

Itu adalah narasi dari sebuah lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh tentang banjir di Banyuwangi, Jawa Tengah, yang dibuat sekitar tahun 1860-an. Lukisan hasil karya seniman bisa saja dibuat karena imajinasi, tetapi bisa juga karena pengalaman kehidupan sehari-hari.

## Jawa yang berkelanjutan

Kini ketika pembangunan secara masif dilakukan oleh pemerintah dengan pemerataan pendanaan dari desa-desa yang tersebar ke seluruh Indonesia,



perlu mitigasi terhadap potensi kebencanaan baik lingkungan terutama berkaitan dengan sumber daya air, lingkungan, dan pelbagai sumber alam.

Air telah menjadi problem besar di Pulau Jawa, baik pada musim hujan maupun pada waktu musim kemarau. Untuk itu, seorang ilmuwan, WJ Blommestein yang lahir di Indonesia dan meraih gelar insinyur dan doktornya di Technische Hoogeschool, Bandung, merancang tata air di Jawa.

Perhatiannya terhadap tata air di Pulau Jawa sudah dimulai sejak muda. Untuk menangani tata air di Pulau Jawa dan Jakarta, ia mengeluarkan gagasan yang dimuat di majalah *de Ingenieur in Nederlands Indies* Nomor 4 dan 5 tahun 1949 dengan judul "Een Federal Welvaartsplan voor het Westelijk Gedeelte van Java".

Dalam tulisan tersebut, ia mengatakan bahwa dalam kurun waktu antara dua kali Perang Dunia (1914-1918 dan 1941-1945) produksi beras di wilayah Asia Tenggara meningkat hanya 10 persen, sedangkan jumlah penduduk pada waktu yang sama meningkat di atas 20 persen.

Saat Blommestein menyampaikan gagasan pada pertemuan insinyur Koninklijk Instituut van Ingenieurs di Batavia, 18 Desember 1949, pikirannya masih tertuju pada Pulau Jawa bagian barat. Inti dari gagasan Blommestein adalah perlunya pembangunan waduk dan terusan (kanal) di Pulau Jawa. Terusan yang dimaksud adalah

terusan dari ujung timur Pulau Jawa sampai Serang, Banten. Dengan adanya terusan tersebut, air dari selatan ditampung dalam terusan tersebut yang sambung-menyambung sehingga dapat menjadi sumber baku air bersih, transportasi, dan mencegah banjir. Namun, gagasan pembangunan terusan tidak terwujud karena biaya yang cukup besar, sedangkan waduk terbangun sebagian.

Kini, Pulau Jawa masih terus menjadi pusat ekonomi nasional. Pembangunan jalur tol Trans-Jawa dari Merak sampai Banyuwangi telah mendorong tumbuhnya pusat ekonomi dan kota-kota akan berkembang sangat cepat. Tentu ini sangat membanggakan, tetapi di lain pihak juga menjadi pekerjaan rumah lain untuk melestarikan alam Jawa yang berkelanjutan.

## Agglomerasi kawasan

Dalam beberapa tahun ke depan, Jawa tak lagi pulau, tetapi sudah menjadi kota Jawa, menyerupai agglomerasi antar-kawasan yang saling menyambung dari ujung barat sampai ujung timur. Proses agglomerasi akan semakin cepat dengan terbangunnya jaringan jalan tol Trans-Jawa di pantura dan disusul jaringan jalan di bagian selatan dan jalur tengah.

Untuk itu, sudah waktunya dipersiapkan rencana induk tata ruang Pulau Jawa yang saling terintegrasi antar-kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Ini menjadi sangat penting untuk menjaga Jawa yang berkelanjutan sebagai sebuah pulau dan kota. Jika tidak direncanakan jauh-jauh hari, maka dalam masa 100 tahun ke depan Jawa sudah menjadi pulau yang sesak dan tidak sehat, terutama dalam hal ketersediaan air dan lahan terbuka.

Ide pemindahan ibu kota negara perlu juga dikaitkan dengan rencana induk pembangunan Pulau Jawa, tidak sekadar mengurangi beban Jakarta, tetapi sebagai upaya membangun Jawa yang berkemajuan dan berkelanjutan.

Judul	<b>Surabaya Perbanyak Taman Kota</b>	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman 12)		
Resume	Pemerintah Kota Surabaya terus menambah taman kota. Kehadiran taman sebagai ruang publik yang dilengkapi arena bermain anak-anak dan olahraga itu bisa menjadi wadah bagi warga menyalurkan bakat dan kreativitas, bersosialisasi dan berinteraksi, sekaligus mempercantik estetika kota dan menyeimbangkan suhu udara.		

## FASILITAS PUBLIK

# Surabaya Perbanyak Taman Kota

**SURABAYA, KOMPAS** — Pemerintah Kota Surabaya terus menambah taman kota. Kehadiran taman sebagai ruang publik yang dilengkapi arena bermain anak-anak dan olahraga itu bisa menjadi wadah bagi warga menyalurkan bakat dan kreativitas, bersosialisasi dan berinteraksi, sekaligus mempercantik estetika kota dan menyeimbangkan suhu udara.

Surabaya dengan luas wilayah 350 kilometer persegi atau sekitar separuh luas DKI Jakarta memiliki 400 taman. Setiap taman memiliki tema, misalnya Taman Lansia, Taman Jayeng Rono, Taman Bungkul, dan Taman Persahabatan.

Terbaru adalah Taman Ex Incinerator yang merupakan bagian dari Taman Harmoni Keputih. Taman bekas tempat pembuangan akhir sampah seluas 2,8 hektar itu diubah menjadi taman yang asri.

Sekretaris Jenderal Persatuan Pemerintah Kota dan Daerah (UCLG) Asia Pasifik Bernadia Irawati Tjandradewi bersama rombongan, Senin (17/6/2019), mengunjungi Taman Harmoni. Turut dalam rombongan, antara lain, Wakil Presiden Provinsi Loire Atlan-

**Pembuatan taman terus dilakukan hingga ruang terbuka hijau kota ini bisa mencapai 30 persen dari luas wilayah.**

tique di Perancis Fanny Salle, Project Officer Cities Unies France and UCLG Simone Gioventti, Spesialis Ruang Publik UCLG David Sagita, dan Koordinator UCLG Aspac M Helmi Abidin.

Bernadia mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Surabaya yang menyediakan ruang publik bagi warga. Apalagi, di sejumlah negara besar, taman mulai jarang ditemui di tengah kota karena keterbatasan lahan. "Surabaya jadi inspirasi untuk kota-kota besar dunia," ujarnya.

Menurut dia, prioritas pembangunan ruang publik sangat tergantung kebijakan pemerintah daerah setempat. Kebanyakan pemerintah setempat memprioritaskan untuk pembangunan pusat perbelanjaan

atau gedung tinggi.

Fanny Salle menilai, pembangunan ruang publik seperti taman di Surabaya sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan mengembangkan kreativitas. Selain itu, taman juga berfungsi menyeimbangkan suhu udara dalam kota.

Ia mengungkapkan, kota-kota besar Perancis tak memiliki cukup alam terbuka, seperti taman. Ketika musim panas tiba, masyarakat banyak yang memilih berpindah.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan, banyaknya taman membuat kota kian nyaman. Ia mengklaim, taman berdampak pada penurunan suhu udara sekitar 2 derajat celsius di Surabaya.

Ia menargetkan setiap tahun ada 10-20 taman baru dan penambahan 10-15 lapangan olahraga. Kini, Surabaya sedang menggarap Kebun Raya Mangrove pertama di Indonesia.

"Pembuatan taman terus dilakukan hingga ruang terbuka hijau kota ini bisa mencapai 30 persen dari luas wilayah. Sekarang luas seluruh ruang terbuka hijau mencapai 26 persen dari luas kota," katanya. (ETA)

Judul	<b>Kota Samarinda Perlu Rp 25,7 M</b>	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman 13)		
Resume	Banjir sehari-hari di sejumlah kabupaten dan provinsi. Banjir kali ini di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara tercatat paling parah. Daya dukung lingkungan telah terlampaui.		

# Kota Samarinda Perlu Rp 25,7 M

Banjir sehari-hari di sejumlah kabupaten dan provinsi. Banjir kali ini di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara tercatat paling parah. Daya dukung lingkungan telah terlampaui.

**SAMARINDA, KOMPAS** — Tahun ini saja pengendalian banjir Kota Samarinda menyerap anggaran setidaknya Rp 25 miliar. Dana dianggarkan dari APBN dan APBD Kalimantan Timur untuk pembangunan embung serbaguna, normalisasi Sungai Karang Mumus, dan peningkatan bendungan Benanga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaltim Rp 906 miliar untuk normalisasi Sungai Karang Mumus dan revitalisasi Kolam Retensi Vorpo Samarinda. Adapun pemerintah pusat mengalokasikan Rp 16.737 miliar untuk pembangunan embung serbaguna, peningkatan Bendungan Benanga, dan penetapan sempadan waduk Lempake.

Pembahasan pengendalian banjir dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Senin (17/6/2019). Pertemuan membahas mengatasi banjir yang meluas di Samarinda. Banjir tahun ini yang terparah, yang menyebabkan ribuan orang mengungsi, akses terputus, dan ribuan rumah terendam sehari-hari.

Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain mengatakan, dalam jangka pendek, pemerintah fokus memperbaiki drainase yang tersumbat. "Untuk jangka panjang lima tahun ke depan, ada empat poin yang akan kami lakukan, yakni normalisasi sungai, relokasi, revitalisasi, dan konservasi," kata Zairin.

Normalisasi akan dilakukan di sepanjang Sungai Karang Mumus yang membelah Samarinda. Sedimentasi di sekitar Sungai Karang Mumus mencapai 2 meter di Pasar Segiri. Sungai akan dikeruk.

Permukiman di sepanjang bantaran sungai akan direlokasi dengan skema pembiayaan yang dibahas Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda. Sekitar 2.500 rumah di sepanjang



**Kondisi** warga di posko pengungsian di Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (17/6/2019). Ketinggian banjir di kawasan ini hampir 4 meter. Banjir parah masih menggenangi empat kabupaten dan menyebabkan sekitar 10.000 warga terdampak.

jang Sungai Karang Mumus akan direlokasi.

Pemerintah juga akan merevitalisasi Waduk Benanga dengan pengerukan serta penyelesaian masalah lahan dan sosial. Di bagian hulu, izin pertambangan akan dievaluasi agar bukaan lahan terkendali.

## Embung hilang

Masalah banjir di Samarinda tidak hanya di sepanjang Sungai Karang Mumus. Embung penampungan air di beberapa lokasi dialihfungsikan. Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, kolam retensi dan embung penampung air berubah fungsi.

Embung Sempaja, Kolam

Retensi Damhuri, dan Embung Bengkuring berubah menjadi permukiman. Embung Muang berubah jadi tambang batubara dan Embung Pampang Kanan jadi perkebunan kelapa sawit.

Kepala BWS Kalimantan III Anang Ichwan mengatakan, pengendalian embung terkendala pembebasan lahan. Solusi yang ditawarkan adalah pembebasan lahan yang berdampak signifikan terhadap banjir.

"Kami tinggal menunggu pembebasan lahan diselesaikan pemerintah kota dan provinsi, baru kami bisa melaksanakan tugas," ujar Anang.

Mahyudin (59), warga RT 030, Kelurahan Temindung Permai, Samarinda Utara, ber-

harap penanganan banjir tak sebatas rencana. Ia yang tinggi tak jauh dari Sungai Karang Mumus tak bisa bekerja saat banjir.

"Saya terima saja program pemerintah asal tidak terkena banjir setiap tahun. Ini banjir cukup parah, bisa 1,5 meter di rumah saya," kata Mahyudin.

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim Pradarma Rupang mengatakan, pemerintah harus konsisten menyelesaikan masalah dari hulu. Pengendalian izin pertambangan harus diwujudkan.

## Banjir Konawe

Di Sulawesi Tenggara, banjir di sejumlah wilayah masih

tinggi. Di sebagian wilayah Konawe Selatan, misalnya, ketinggian air lebih dari 3 meter. Perbaikan kawasan hutan harus dilakukan karena 300.000 hektar hutan di Sultra kritis.

Hingga hari ke-10, banjir masih tinggi di sebagian Konawe Selatan. Di Dusun III, Kecamatan Ranomeeto Barat, tinggi banjir lebih dari 3 meter merendam 30 rumah.

Puluhan keluarga mengungsi di sebuah SD dan belum bisa pulang. "Sudah sehari-hari di sini. Air sudah turun sekitar 30 sentimeter, tetapi masih sampai atap rumah. Barang-barang sudah habis," ucap Asman (27), pengungsi.

Menurut Asman, banjir kali

ini paling parah. Air limpahan Sungai Konawe cepat menggenangi kampung. Dalam hitungan jam, air mencapai bagian dalam rumah dan atap.

Irfan (30), pengungsi lain, menyebut, saat banjir 2013, air setinggi pinggang. Oleh karena itu, ia tinggikan fondasi. "Sekarang sudah sampai atap, tertutup air semua," katanya.

Wilayah Konawe Selatan merupakan satu dari empat kabupaten terdampak banjir parah beberapa hari terakhir. Di wilayah ini, 1.059 keluarga terdampak dengan 5.245 jiwa.

Banjir kali ini lebih dari dua minggu. Selain Konawe Selatan, banjir merendam Konawe, Konawe Utara, dan Kolaka Timur. Sedikitnya 50 kecamatan dengan ratusan desa/kelurahan terendam. Sekitar 10.000 keluarga terdampak, puluhan ribu jiwa mengungsi.

Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara Subandriyo mengatakan, dari hampir 900.000 hektar lahan kritis, sekitar 300.000 ha berada di kawasan hutan. Selebihnya di luar kawasan hutan.

"Kami perkirakan sekitar 60 persen wilayah Sultra ini masih tertutup hutan. Memang ada yang kritis, tetapi terus diperbaiki," ucapnya.

Sementara itu, banjir juga merendam Kabupaten Tanah Laut dan Tabalong, Kalimantan Selatan. Sepakan lalu, banjir melanda Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel Wahyuddin, banjir di Tanah Laut merendam 236 rumah. Ketinggian air sempat 1 meter, tetapi berangsur surut.

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, banjir di Kalsel belum hanya karena curah hujan tinggi, melainkan juga daya dukung dan daya tampung lingkungan rusak. (CFP/JAL/JUM)

Judul	<b>Jembatan Way Mesuji di Lampung Ambles</b>	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman 14)		
Resume	Jembatan di Mesuji Lampung, ambles akibat dilewati dua truk dengan berat melebihi kapasitas jembatan. Arus lalu lintas dialihkan dari timur ke jalur tengah.		



**Jembatan Way Mesuji** di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Kilometer 200, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Lampung, rusak berat, Senin (17/06/2019). Sebagian pelat jembatan ambles sehingga jembatan tidak bisa dilalui. Arus lalu lintas dari Lampung menuju Sumatera Selatan dan sebaliknya terpaksa dialihkan lewat jalur lintas tengah.

# Jembatan Way Mesuji di Lampung Ambles

Jembatan di Mesuji, Lampung, ambles akibat dilewati dua truk dengan berat melebihi kapasitas jembatan. Arus lalu lintas dialihkan dari timur ke jalur tengah.

**BANDAR LAMPUNG, KOMPAS** — Jembatan Way Mesuji di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Kilometer 200, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Lampung, ambles. Arus lalu lintas dari Lampung ke Sumatera Selatan di lintas timur terputus.

Berdasarkan pantauan *Kompas*, Senin (17/6/2019) siang, dua truk bermuatan semen dan sawit terjebak di tengah jembatan. Sebagian pelat jembatan sepanjang 120 meter itu ambles. Hingga Senin malam, petugas dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX belum dapat mengevakuasi kedua truk.

Sempat terjadi kemacetan lalu lintas. Namun, Senin sore, arus kendaraan kembali normal. Untuk mengurai kemacetan, arus lalu lintas dari Lampung menuju Sumsel dialihkan ke Jalan Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung melalui Gerbang Tol Simpang Pematang, Mesuji. Ruas tol yang masih dikerjakan itu dibuka sementara.

Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir Ajun Komisaris Besar Donni Eka Saputra mengatakan, kendaraan yang telanjur berada di perbatasan Sumsel-Lampung diarahkan

melewati jalur Tol Pematang Panggang-Kayu Agung. "Tol dibuka dua arah untuk mengurangi kemacetan di daerah perbatasan," katanya.

Setelah kemacetan terurai, jalur tol kembali ditutup. "Hal ini dilakukan agar pembangunan tol dapat dilanjutkan kembali," katanya. Ruas tol ini digunakan selama masa Lebaran.

Wakil Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung Ajun Komisaris Besar Anang Tri saat meninjau lokasi menjelaskan, pelat jembatan ambles pada Senin sekitar pukul 00.30. Hal itu terjadi setelah truk bermuatan semen dan sawit dengan berat sekitar 60 ton melintas.

"Kemampuan jembatan tidak sesuai dengan kapasitas truk yang lewat. Jembatan ini hanya dapat menahan beban maksimal 30 ton," kata Anang.

## Dialihkan sementara

Untuk selanjutnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung mengalihkan sementara kendaraan yang mengarah ke Sumsel melalui jalur lintas tengah (jalinteng) Sumatera melalui Terbanggi Besar-Kota Bumi-Bukit Kemuning-Martapura.

Menurut Anang, Polda Lampung telah memasang sejumlah pengumuman mulai dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, untuk mencegah pengendara melintas di jalur lintas timur (jalintim) Sumatera.

Di Palembang, Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Komisaris Besar Dwi Asmoro menyatakan, untuk kendaraan dari Sumsel menuju Lampung, pengalihan dilakukan di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Kendaraan yang hendak ke Lampung diimbau melewati jalinteng Sumatera mulai dari Kota Prabumulih-Baturaja-Martapura-Kotabumi-Terbanggi Besar.

"Akan ada petugas yang mengarahkan pengendara untuk ke jalur lintas tengah," katanya. Jalintim Sumatera hanya boleh dilintasi kendaraan menuju Kayu Agung, Sumsel.

Dwi memaparkan, volume kendaraan yang melintasi jalintim mencapai 2.000 kendaraan per hari. Dengan pengalihan ini, tentu akan terjadi kepadatan di kawasan jalinteng. Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan polres-polres yang terdampak untuk melakukan antisipasi lalu lintas di jalur kawasan yang

rawan.

## Perbaiki jembatan

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Bandar Lampung Muh Insal U Maha mengatakan, petugas masih fokus melakukan evakuasi dua truk yang terjebak menggunakan alat berat. Belum dapat dipastikan kapan evakuasi truk selesai.

Menurut Insal, tim dari Jakarta akan meninjau lokasi untuk menilai kerusakan. Perbaikan jembatan diprediksi 7-14 hari.

Terputusnya jembatan di Mesuji berdampak besar bagi kendaraan. Jalintim memiliki jarak lebih pendek dibandingkan dengan melalui jalinteng. "Selisih waktunya bisa 1,5-2 jam," ujar Ade Putrawansyah (35), sopir bus yang membawa penumpang dari Jakarta menuju Palembang.

Ade terpaksa mengalihkan 14 penumpang ke kendaraan lain dari Mesuji menuju Palembang. Ia memutuskan kembali ke Jakarta karena khawatir ada pengalihan jalan. "Biaya operasional menjadi lebih mahal. Saya sudah rugi Rp 1,4 juta," kata Ade.

(VIO/RAM)

Judul	<b>Pemberdayaan Citarum Bisa Diakses Dana Desa</b>	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman 14)		
Resume	Dana desa sekitar Rp 1 miliar per desa setiap tahun boleh dimanfaatkan program pemberdayaan masyarakat desa dalam mitigasi bencana.		

## MITIGASI BENCANA

# Pemberdayaan Citarum Bisa Akses Dana Desa

**BANDUNG, KOMPAS** — Dana desa sekitar Rp 1 miliar per desa setiap tahun boleh dimanfaatkan program pemberdayaan masyarakat desa dalam mitigasi bencana. Perangkat desa bersama warga bisa merancang program tangguh bencana.

Secara hukum, itu diatur Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. "Penanggulangan bencana salah satu prioritas penggunaan dana desa," ujar Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana Kemendesa Hasman Ma'ani di Kota Bandung, Senin (17/6/2019).

Kemarin, sekitar 90 perwakilan desa dari dua kecamatan (Kertasari dan Pacet) di hulu Citarum mengikuti lokakarya Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat yang diadakan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lokakarya lima hari itu bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman di DAS Citarum.

Dosen Program Studi Magister Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, mengatakan, dengan dana itu, warga bersama

perangkat desa bisa membangun sistem desa tangguh bencana. Hal itu dimulai dari pemetaan potensi bencana di desa.

Karena berada di ketinggian, desa-desa di Kecamatan Kertasari dan Pacet punya kerawanan gerakan tanah. "Pemetaan itu harus disosialisasikan, lalu dibuat kebijakan mengurangi risiko yang bisa dijalankan warga," ujarnya.

### Terus bertambah

Setiap tahun, kucuran dana desa terus meningkat. Tahun ini besarnya mencapai Rp 70 triliun yang diberikan kepada lebih dari 74.000 desa. "Sayang jika dana itu tak dimanfaatkan. Masyarakat bersama perangkat desa dapat bermusyawarah menyusun program meningkatkan kapasitas warga menghadapi bencana," ujar Hasman.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa menuturkan, upaya penanggulangan bencana bisa dimulai dengan mengubah kebiasaan merusak. "Hentikan penebangan hutan karena bisa memicu longsor," ujarnya.

Iwa juga mengajak peternak di hulu Citarum tidak membuang kotoran ternak sembarangan. Selain sampah domestik dan limbah industri, sungai sepanjang 297 kilometer itu tercemar kotoran ternak. (TAM)

Judul	Penataan Kota Pacu Industri Kreatif	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman 14)		
Resume	Penataan kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, terus dilakukan. Penataan itu dilakukan untuk menjadi destinasi wisata unggulan sekaligus menjadi etalase industri kreatif produk asal Jateng dan sekitarnya.		

## KOTA LAMA SEMARANG

# Penataan Kota Pacu Industri Kreatif

**SEMARANG, KOMPAS** — Penataan kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, terus dilakukan. Penataan itu dilakukan untuk menjadi destinasi wisata unggulan sekaligus menjadi etalase industri kreatif produk asal Jateng dan sekitarnya.

Salah satunya adalah Galeri Industri Kreatif Semarang, yang menempati bangunan lama milik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Galeri itu memfasilitasi pelaku industri kecil dan menengah (IKM), khususnya mode, furnitur, barang antik, kerajinan tangan, dan kuliner.

Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang Nurjanah, mengatakan, salah satu tujuan revitalisasi Kota Lama adalah menjadi tujuan wisata. "Dari situ akan ada *multiplier effect* (dampak ikutan), baik sektor perhotelan, kuliner, maupun

produk para pelaku IKM kreatif," ujar Nurjanah, Senin (17/6/2019), di Semarang.

Galeri Industri Kreatif Semarang ini merupakan "keroyokan" sejumlah lembaga, antara lain Kementerian Perindustrian, Pemprov Jateng, Pemkot Semarang, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Bank Jateng, PT Pertamina, PT Angkasa Pura, dan PT Brantas Abipraya. Galeri itu menawarkan produk IKM berkualitas premium.

Para pedagang tidak dipungut biaya, termasuk sewa. Hal ini karena tanggung jawab sosial perusahaan. "Misalnya gerobak (lapak) pedagang barang antik oleh Angkasa Pura. Gerai kuliner oleh Pertamina. Sistem pembayarannya non-tunai," kata Nurjanah.

Pedagang sekaligus Ketua Pasar Barang Antik Kota Lama Semarang Anton Susatyo

berharap, seiring tuntasnya revitalisasi Kota Lama, akan semakin banyak pengunjung yang datang.

"Kami ingin meramaikan Kota Lama. Kita belum punya pasar barang antik seperti Triwindu di Solo," ujarnya.

Pedagang barang antik lainnya, Ibrahim (60), menuturkan, sebulan berdagang di Galeri Industri Kreatif Semarang, jumlah pembeli menurun sekitar 50 persen. Namun, ia yakin, ini bagian dari proses. Ke depan akan semakin banyak pengunjung Kota Lama yang mampir ke gerainya.

Galeri itu melengkapi roda ekonomi kreatif di Kota Lama. Sebelumnya, pada 2017, Pemkot Semarang meresmikan Semarang Creative Gallery atau Galeri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai wahana promosi UMKM asal Semarang. (DIT)

Judul	<b>DKI Hapus Rperda Rencana Tata Ruang Pantai Jakarta</b>	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Koran Tempo (Halaman 18)		
Resume	Pengamat tata kota mempertanyakan aturan tentang kewajiban pengembang reklamasi. Pemerintah DKI Jakarta menghapus Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.		



Bangunan di pulau reklamasi Pulau D, Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Jumat lalu.

# DKI Hapus Raperda Rencana Tata Ruang Pantai Jakarta

Pengamat tata kota mempertanyakan aturan tentang kewajiban pengembang reklamasi.

**Gangsar Parikesit**  
gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Pemerintah DKI Jakarta menghapus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Padahal, sebelumnya melalui raperda itu, pemerintah DKI berencana mengatur tata ruang di pulau reklamasi.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menuturkan raperda itu dibatalkan karena pemerintah DKI tidak lagi melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Selain itu, pulau reklamasi yang telah terbentuk, yakni Pulau C (kini disebut kawasan Pantai Kita), Pulau D (kini disebut Pantai Maju), dan Pulau G (kini disebut Pantai Bersama), telah menjadi pantai yang termasuk dalam daratan Jakarta. "Jadi enggak ada lagi (Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta)," kata

dia di Balai Kota, kemarin. Pada 23 November 2017, Gubernur Anies Baswedan menyurati Dewan dan menyatakan ingin mengkaji Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kemudian, Dewan mengembalikan dua raperda itu kepada pemerintah DKI. Namun hingga kini pemerintah DKI dan Dewan tak kunjung membahas kembali dua raperda itu.

Untuk Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, kata Saefullah, pemerintah DKI tinggal melanjutkan kajiannya. Apalagi sebelumnya pemerintah Jakarta pernah mengkaji raperda tersebut.

Menurut Saefullah, penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan di kawasan Pantai Maju tidak perlu menunggu pengesahan

Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sebab, raperda itu hanya berfungsi untuk mengatur zonasi pulau-pulau. "Tidak ada kaitannya (antara raperda dan penerbitan IMB)," ujar dia.

Kepala Seksi Tata Kelola Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Devi Lidia menuturkan kajian atas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah rampung. Saat ini, Dinas masih menunggu jawaban dari Kementerian Kelautan mengenai kajian draf raperda itu.

Setelah Kementerian Kelautan memberikan persetujuan atas kajian itu, kata Devi, raperda akan diserahkan kepada DPRD Jakarta untuk dibahas menjadi peraturan daerah. "Targetnya raperda itu rampung pada 2019," ujar dia.

Pengamat tata kota dari

**"Kalau raperda itu dibatalkan, terus kompensasi tambahan kontribusinya seperti apa?"**

## Dasar Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

**GUBERNUR** DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan yang berdiri di kawasan Pantai Maju untuk PT Kapuk Naga Indah telah sesuai dengan aturan. Berikut ini aturan yang dijadikan dasar dalam penerbitan IMB itu.

**Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.**

**Pasal 18**  
ayat 3

Bagi daerah yang belum memiliki RTRW kabupaten/kota, RDTRKP dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan, pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

ayat 4

Apabila RTRW kabupaten/kota, RDTRKP dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, fungsi bangunan gedung yang telah ada harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan.

**Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.**

**Pasal 2**

Penyusunan PRK Pulau C, D, dan E dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam persiapan dan perencanaan pengembangan Pulau C, D, dan E sebagai hasil reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

**Pasal 3**

PRK Pulau C, D, dan E hasil reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang terpadu melalui konsep superblock dengan fungsi perumahan horizontal, perumahan vertikal, kegiatan pariwisata dan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa secara terbatas beserta fasilitasnya dalam satu kesatuan perencanaan, sehingga pemanfaatan lahan dan ruang kota di sekitar kawasan menjadi lebih terarah.

**Pasal 4**

PRK Pulau C, Pulau D, dan Pulau E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat indikatif.

**Pasal 9**

PRK Pulau Reklamasi Pulau C, D, dan E ini ditujukan untuk mengarahkan kegiatan perencanaan dan persiapan pengembangan serta pemanfaatan ruang Pulau C, D, dan E, dengan persyaratan sebagai berikut:  
apabila Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ditetapkan, peraturan Gubernur ini harus disesuaikan dengan peraturan daerah dimaksud dan segala risiko atas hal tersebut menjadi tanggung jawab pengembang Pulau C, D, dan E.

SUMBER: PERATURAN PEMERINTAH 36 TAHUN 2005 DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 206 TAHUN 2016

Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, heran atas keputusan pemerintah DKI yang membatalkan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dia juga mempertanyakan aturan mengenai kewajiban pengembang reklamasi jika raperda itu dihapuskan.

Dalam draf Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang pernah dibahas bersama Dewan itu, tertera tiga kewajiban pengembang reklamasi pada pemerintah DKI Jakarta, yaitu kewajiban, kontribusi, dan tambahan

kontribusi. "Kalau raperda itu dibatalkan, terus kompensasi tambahan kontribusinya seperti apa?" kata dia.

Sebelum raperda itu ditarik oleh Gubernur Anies, pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta menggantung di pasal tambahan kontribusi. Kala itu, Gubernur DKI berbeda pendapat dengan sejumlah anggota Dewan tentang tambahan kontribusi yang wajib dibayarkan pengembang reklamasi ke pemerintah DKI.

● JUNIUS FIRMANSYAH

Judul	Smart City Terimpit, Perlu Perubahan Paradigma	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 2)		
Resume	Bisnis Indonesia edisi Kamis 13 Juni 2019 halaman 21 menyajikan liputan bertajuk Kota Pintar Terimpit Ambisi Pemda. Dalam artikel tersebut disebutkan dua nara sumber memberikan keterangan mengenai hambatan yang mereka alami dalam menggelar jaringan telekomunikasi (yang merupakan infrastruktur utama Smart System) di berbagai daerah.		

# Smart City Terimpit, Perlu Perubahan Paradigma

**B**isnis Indonesia edisi Kamis 13 Juni 2019 halaman 21 menyajikan liputan bertajuk Kota Pintar Terimpit Ambisi Pemda. Dalam artikel tersebut disebutkan dua nara sumber memberikan keterangan mengenai hambatan yang mereka alami dalam menggelar jaringan telekomunikasi (yang merupakan infrastruktur utama *Smart System*) di berbagai daerah.

Intinya pelaku usaha yang berniat memasang jaringan telekomunikasi untuk mendukung *smart system* dihadapkan pada keragaman regulasi yang diberlakukan oleh berbagai pemerintah daerah (Pemda). Artikel tersebut menyiratkan banyak Pemda yang lebih mendahulukan meraih pendapatan asli daerah (PAD) ketimbang membangun infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerahnya.

Masalah yang menjadi pertanyaan dalam kolom ini adalah apakah hambatan pengelaran infrastruktur merupakan satu-satunya kendala dalam membangun Kota Pintar?

Jika kita tarik ke belakang, wacana Kota Pintar (*Smart City*) awalnya lebih banyak digaungkan oleh para praktisi atau penggiat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seiring berkembangnya aplikasi internet yang memasuki hampir semua bidang kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya, dapat dipahami bila pendekatan yang ditawarkan lebih diwarnai oleh nuansa adopsi teknologi tertentu daripada sebuah ide transformasi pelayanan publik secara komprehensif dengan memanfaatkan TIK.

Ada yang dilupakan, sebagai kata ganti 'tidak diketahui' oleh para ahli dan praktisi TIK bahwa pemerintahan merupakan organisasi yang berbeda bila dibandingkan dengan organisasi swasta. Bila

implementasi TIK di suatu organisasi bisnis relatif mudah dilaksanakan dan berhasil, cukup perintah (kadang bahkan lisan) dari pemilik atau direktur. Hal yang sama belum tentu berhasil bila diterapkan di lingkungan organisasi pemerintahan. Mengapa demikian?

*Smart City*, bila ia menjadi sebuah program Pemda, agar dapat dilaksanakan secara konsisten harus merupakan produk kebijakan publik dalam wujud surat keputusan (SK) kepala daerah (bupati atau wali-kota), sehingga tersedia anggaran dan sumber daya lain yang diperlukan. Tanpa SK kepala daerah, *Smart City* hanya merupakan wacana saja. Demikian pula, meski ada SK, ini pun belum tentu menjamin *Smart City* akan dibangun, dioperasikan, dirawat, dan digunakan secara terus menerus dalam melayani masyarakat.

*Smart City* bukan hanya masalah tergelar jaringan telekomunikasi dan warga kota dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Lebih dari pada itu, *Smart City* merupakan wajah kehidupan baru pemerintahan kota, yang tercermin dari, paling tidak, bagaimana kesiapan dan kemampuan warga kota dalam menggunakan perangkat TIK, memanfaatkan aplikasi layanan publik secara *online*, baik yang *mobile* maupun yang *fixed*.

Selain itu juga menyoal intensitas dan kualitas hubungan antarwarga (*citizen to citizen/*

C2C), antara warga dan OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik (*citizen to government/C2G* atau G2C), antar-OPD (*government to government/G2G*), serta bagaimana pemerintah kota menata dan mengatur sarana dan prasarana kota (pasar, sekolah, jalan raya, lampu lalu lintas, sampah, sarana ibadah, pelayanan kesehatan,

pedagang kaki lima, dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari isi kota) secara otomatis, swakendali tanpa ada yang dikecualikan, dengan tingkat kegagalan (*failure rate*) yang sangat rendah (kurang dari 1%).

Memang, tanpa tersedia jaringan telekomunikasi, tidak mungkin terbangun *Smart City*. Posisi strategis jaringan telekomunikasi terhadap *Smart City* inilah yang diduga menggoda syahwat banyak pejabat Pemda untuk mendahulukan PAD

daripada bervis jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan warga, dan pada saatnya akan memanen dari meningkatnya aktivitas ekonomi yang layak dikenakan bea untuk mendukung PAD.

Selama paradigma di kepala para pejabat Pemda tidak diubah maka *Smart City* akan terus terimpit, sulit terwujud. Bila ini menjadi wabah yang menimpa banyak Pemda, di khawatirkan *governance* di OPD akan semakin tertinggal. Dan apabila ini yang terjadi maka benarlah apa yang dikatakan oleh Schuck dalam *Why Government Fails So Often, And How It Can*

*do Better* (2015) bahwa kecenderungan pemerintahan yang gagal memenuhi kewajibannya dalam melayani publik (*dysfunctional*) disebabkan oleh kombinasi dari beragam faktor seperti orientasi pejabat pemerintah terhadap sasaran jangka pendek daripada jangka panjang (karena masa baktinya dibatasi), motivasi mendapatkan insentif untuk diri pribadi dan pihak lain terkait dengan dari setiap kebijakan yang diterbitkannya, dan rasionalitas dalam memilih opsi-opsi keputusan yang berdampak luas terhadap kepentingan publik.

Selain itu ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis serta ketidakcakapan dalam disiplin manajemen pemerintahan.

Terkait dengan *Smart City*, ada satu hal yang tidak disebutkan Schuck sebagai penyebab kegagalan pemerintah dalam melayani publik, yakni kesiapan dan partisipasi warga. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan ketidaksiapan warga dalam mengadopsi implementasi pelayanan berbasis TIK mengurangi tingkat kesuksesan program pelayanan publik berbasis TIK (dalam wujud aplikasi *electronic government*).

Hal ini terjadi lantaran OPD penyelenggara *electronic government* berwawasan sempit. Dalam benak mereka apa saja yang disediakan pemerintah, pasti warga akan mengetahui, memanfaatkan. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian.

Oleh karena itu, *Smart City*, di mana di dalamnya harus ada *electronic government*, diperkirakan akan sukses berkelanjutan hanya bila dalam membangunnya menggunakan pendekatan terpusat kepada warga (*citizen-centered approach*), bukan mendahulukan kepentingan politik, minat pejabat, atau alasan meningkatkan pendapatan asli daerah.



**MAS WICANDORO  
ROES SETIYADI**  
Pemerhati Kebijakan  
Teknologi dan Ekonomi  
& Doktor Ilmu Pemerintahan  
dari Institut  
Pemerintahan Dalam Negeri

Judul	<b>AIR MINUM JATILUHUR TAHAP I : Jasa Tirta II Belum Dapat Penjaminan</b>	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Proyek pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur Tahap I berpotensi tertunda karena Perum Jasa Tirta II selaku penanggung jawab proyek kerja sama tidak mendapat persetujuan penjaminan. Proyek bisa berlanjut bila skema pengusahaan diubah.		

► AIR MINUM JATILUHUR TAHAP I

# Jasa Tirta II Belum Dapat Penjaminan

Bisnis, JAKARTA — Proyek pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur Tahap I berpotensi tertunda karena Perum Jasa Tirta II selaku penanggung jawab proyek kerja sama tidak mendapat persetujuan penjaminan. Proyek bisa berlanjut bila skema pengusahaan diubah.



Rivki Maulana  
rivki.maulana@bisnis.com

Direktur Keuangan Perum Jasa Tirta (PJT) II Haris Zulkarnain mengatakan bahwa perusahaan telah mengajukan penjaminan atas risiko terminasi dan risiko gagal bayar.

Nilai penjaminan atas risiko terminasi dan risiko gagal bayar yang diajukan masing-masing sebesar Rp1,20 triliun dan Rp700 miliar.

Penjaminan diperlukan karena kapasitas keuangan perseroan tidak mencukupi untuk menanggung dua risiko tersebut. Pada 2018, aset PJT II tercatat Rp1,40 triliun, sedangkan kas mencapai Rp600 miliar.

"Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa tidak bisa memberi dukungan untuk terjadi risiko gagal bayar. Kami tidak bisa melanjutkan jika tidak ada dukungan," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (17/6).

Dia menerangkan, kemungkinan risiko gagal bayar cukup besar bila pembangunan SPAM tidak selaras dengan pembangunan jaringan distribusi yang harus dibangun oleh pihak pembeli atau offtaker. Ada empat pembeli air dalam proyek

► Nilai penjaminan atas risiko terminasi dan risiko gagal bayar yang diajukan masing-masing sebesar Rp1,20 triliun dan Rp700 miliar.

SPAM Jatiluhur, yaitu PAM Jaya, PDAM Tirta Patriot Bekasi, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, dan PDAM Tirta Tarum Karawang.

Menurut Haris, risiko gagal bayar timbul jika offtaker tidak melakukan pembayaran atas pembelian air.

Sementara itu, perseroan harus tetap melakukan pembayaran kepada badan usaha pelaksana yang nantinya memenangi lelang.

Haris mengungkapkan bahwa PJT II sudah melaporkan perkembangan terkini terkait dengan proyek SPAM Jatiluhur Tahap I kepada Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

"Kami sudah laporan dan sekarang kami menunggu arahan [terkait keberlanjutan proyek]," tuturnya.

Pemohonan penjaminan yang tidak dikabulkan tak ayal membuat proyek SPAM Jatiluhur Tahap I berpotensi besar kembali tertunda.

Haris mengakui penjaminan memegang peran vital dalam proyek SPAM yang dirancang dengan kapasitas produksi 5.000 liter per detik itu.

**PENUNDAAN BERLANJUT**

Dalam catatan *Bisnis*, bila proyek ini tertunda, hal ini akan menjadi penundaan kesekian kalinya. Pada 2013, PJT II mendapat penugasan dari Kementerian



**Pemasok Air-Minum untuk 4 Wilayah**

Bertambahnya populasi di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya menyebabkan kebutuhan akan air minum juga meningkat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Perum Jasa Tirta tengah melakukan prakualifikasi lelang proyek SPAM Jatiluhur Tahap I. Dengan kapasitas 5.000 liter per detik, keberadaan SPAM tersebut nantinya dapat memenuhi dan memperbesar jangkauan akses air minum di empat wilayah.

Pekerjaan Umum untuk menjadi penanggung jawab proyek kerja sama (PJKP) dan mencari mitra strategis.

Dua tahun berselang, PJT II bersama PT Wijaya Karya Tbk., PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk., dan PT Tirta Gemah Ripah mendirikan PT Air Minum Indonesia (AMI) sebagai entitas yang akan mengusahaan proyek SPAM Jatiluhur.

**Profil SPAM Jatiluhur I**

Biaya Investasi <b>Rp4 triliun*</b>	Tarif air curah <b>Rp3.200/m<sup>3</sup>**</b>	Kapasitas <b>5.000 liter/detik</b>
Rencana konstruksi <b>2019</b>	Rencana pengumuman pemenang <b>Juni 2019</b>	<b>Peserta lulus prakualifikasi</b>
Pembeli <b>Kabupaten Karawang, Kabupaten &amp; Kota Bekasi, serta DKI Jakarta</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Adaro Tirta Mandiri</li> <li>2. Konsorsium PT PP (Persero) Tbk. &amp; PT Jakarta ProPERTINDO</li> <li>3. Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. &amp; PT Tirta Gemah Ripah</li> <li>4. Konsorsium PT Aetra Air Jakarta &amp; PT Moya Indonesia</li> </ol>

Sumber: Kementerian PUPR, Perum Jasa Tirta II, dokumen Web \*) Tidak termasuk pembayaran di muka. \*\*) Dalam termasuk biaya overhead.

BSI&GTR/UTOW/IR&ADT/10 ENO

Keberlanjutan proyek ini mendapat titik cerah karena pada Oktober 2017 mulai menggelar penajakan minat pasar dan tahap prakualifikasi dimulai 2 bulan kemudian.

Saat ini, proyek SPAM Jatiluhur telah melewati tahap prakualifikasi yang mana empat peserta dinyatakan lulus pada Maret 2018.

Keempat peserta yang lulus prakualifikasi yaitu PT Adaro Tirta Mandiri,

PT PP Tbk.-PT Jakarta ProPERTINDO, konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.-PT Wijaya Karya Tbk.-PT Tirta Gemah Ripah, dan konsorsium PT Aetra Air Jakarta-PT Moya Indonesia.

Sejak pengumuman prakualifikasi, hingga saat ini progres proyek SPAM Jatiluhur I belum berlanjut ke tahap pelangan. □

Judul	Sebagian Jakarta Rawan Tenggelam	Tanggal	Selasa, 18 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Pepindahan Ibu Kota ke luar Jawa dipicu dari beberapa hal yang dikhawatirkan oleh negara salah satunya adalah air tanah yang makin langka serta sebagian wilayah Jakarta yang diprediksi tenggelam pada 2050.		



**Bisnis, JAKARTA** — Perpindahan Ibu Kota ke luar Jawa dipicu dari beberapa hal yang dikhawatirkan oleh negara salah satunya adalah air tanah yang makin langka serta sebagian wilayah Jakarta yang diprediksi tenggelam pada 2050.

Putri Salsabila  
redaksi@bisnis.com

Berdasarkan hasil penelitian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019, proyeksi ketersediaan air di Jawa saat ini hingga 2035 telah memasuki kategori kuning atau kelangkaan karena ketersediaan air hanya 500 hingga 1.000 meter kubik/kapita/tahun.

Pada 2040, proyeksi ketersediaan air di Jawa telah memasuki kategori merah atau kelangkaan mutlak yang hanya memiliki ketersediaan air sebanyak di bawah 500 meter kubik/kapita/tahun.

Ahli Geodesi Institut Teknik Bandung Heri Andreas mengatakan bahwa pembangunan di

Jakarta memberi dampak buruk terhadap penyerapan air tanah. Dia memprediksi 95% bagian utara Jakarta akan terendam pada 2050.

"Salah satu faktor utama Jakarta terancam tenggelam pada 2050 adalah penggunaan air tanah yang berlebihan, jika air tanah diambil secara terus menerus maka muka tanah akan menurun dan lebih rendah dari laut," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (17/6).

Heri mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah hanya dapat menyediakan 40% jumlah air dari kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Sisanya, 60% masyarakat mencari sumber air dari sumbu bor atau air tanah.

"Air adalah hak setiap penduduk, ketika pemerintah belum bisa menyediakan air selain air

► **Pengembang, pemilik hotel, dan apartemen diimbau untuk melakukan pengelolaan air yang baik dan meminimalisir penggunaan air tanah.**

► **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menghentikan penggunaan air tanah di DKI Jakarta pada 2020**

tanah, masyarakat tidak bisa dilarang ketika menggunakan air tanah," ujarnya.

Heri menuturkan bahwa topografi Jakarta saat ini telah lebih rendah dibandingkan dengan laut dan setiap tahun di beberapa wilayah akan mengalami penurunan 10 sentimeter sehingga memiliki potensi tenggelam.

Wilayah yang mengalami penurunan 10 sentimeter per tahun yakni Jakarta Barat, Jakarta Timur, serta Jakarta Utara.

Heri menuturkan bahwa wilayah Jakarta Utara sudah masuk dalam kategori risiko tinggi untuk pembangunan yang masif.

Dia menyarankan agar pengembang atau pemilik hotel ataupun apartemen untuk melakukan *water harvesting* atau pengelolaan air yang baik, dan meminimalisir penggunaan air tanah.

Pemerintah, katanya, dapat mempelajari proses *water harvesting* yang dilakukan Singapura dalam memanfaatkan air. Hingga saat ini, lanjutnya, Singapura sangat menjaga penggunaan air tanah sehingga pembangunan tetap dapat berjalan dan muka tanah tidak mengalami penurunan.

#### DAYA DUKUNG

Senada dengan Heri, pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan bahwa pembangunan Kota Jakarta yang tidak dilindungi dengan penguatan daya dukung lingkungan dapat memicu tenggelamnya Jakarta.

"Pembangunan gedung dan kawasan industri membutuhkan air, tetapi ketersediaannya tidak mencukupi sehingga mereka ambil air dari tanah dengan pompa. Di sini peran ruang terbuka hijau dengan resapan air dibutuhkan, sedangkan ruang terbuka hijau saat ini hanya 9,98%," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (17/6).

Nirwono mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya yang serius dalam pengelolaan air tersebut karena apabila tidak dilakukan maka banjir dan krisis air bersih serta kemarau akan terjadi.

Menurutnya, terdapat lima langkah yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan yakni refungsionalisasi 13 bantaran kali utama (terlepas dari normalisasi dan naturalisasi), revitalisasi situ danau, embung, dan waduk se-DKI Jakarta sebanyak 109 buah.

Hal yang perlu segera dilakukan yakni penghentian pengambilan air tanah, peningkatan kapasitas suplai air baku, dan pembuatan instalasi pengolahan air limbah terpadu dan komunal serta pembangunan sumbu resapan dan kolam penampung air.

"Pengembang dan pemerintah harus menerapkan pembangunan properti hijau yang lebih ramah lingkungan, hal lima langkah tersebut bisa ditekankan oleh pengembang di masing-masing kawasan pengembangannya," tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menghentikan penggunaan air tanah di DKI Jakarta pada 2020 dan

menggantinya dengan air permukaan guna mengatasi masalah penurunan permukaan air tanah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljoko mengatakan bahwa pemerintah bakal memberhentikan suplai air tanah di Ibu Kota lantaran terus terjadi penurunan permukaan tanah tiap tahunnya.

Adapun, air di Jakarta saat ini bersumber dari Perum Jasa Tirta II dari Jatiluhur dengan kapasitas air baku sebanyak 16 meter kubik per detik.

Sementara itu, Kementerian PUPR akan mengembangkan neraca air (*water balance*) dari suplai sebanyak 10 meter kubik—15 meter kubik per detik yang masih bisa diolah menjadi pasok air bersih di Jakarta.

"Sekarang ini mereka pakai air tanah makanya turun terus muka tanahnya. Nanti kalau sudah ada tambahan dari [Rendungan] Jatiluhur dan Karan, kita setop [penggunaan] air tanah. Satu-satunya jalan adalah [menyetop] penggunaan air tanah untuk bisa menahan [laju] penurunan permukaan tanah di Jakarta. Bagaimana bisa kita menyetop air tanah? [Caranya], kita tambah dulu airnya," ujar Basuki. □